

Distorsi Komunikasi Pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi di Media Sosial

Pajar Hatma Indra Jaya

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281

Email: pajar.jaya@uin-suka.ac.id

***Abstract:** Jokowi's image as a leader is populist-nationalist. However, there were some contradictory news with the related image in the social media, which is released in December 2016 until January 2017. This research aims to explore those distorted news. It is revealed that the government media framing did not dominate the social media. The news were interpreted or added in accordance with the viewer's interest that leads to a hoax. This research reinforces Barthes, Baudrillard, and Eco that the era of social media brings the death of reality.*

***Keywords:** death of reality, discourse, image, hoax*

***Abstrak:** Presiden Jokowi memiliki citra pemimpin pro-wong cilik dan berasal dari partai nasionalis. Pada bulan Desember 2016 sampai Januari 2017 muncul banyak berita di media sosial yang berbeda dengan image tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memeriksa dan mengeksplorasi distorsi pemberitaan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa framing pemberitaan versi pemerintah tidak mendominasi informasi di media sosial. Berita yang dominan adalah fakta yang sebagian telah dihilangkan, ditambah, ataupun diinterpretasi sesuai kepentingan pengutip sehingga menjadi hoax. Penelitian ini menguatkan konsepsi Barthes, Boudrilad, dan Eco bahwa di era media sosial banyak berita menunjukkan kematian realitas.*

***Kata Kunci:** citra, hoax, kematian realitas, wacana*

Kebijakan adalah instrumen pemerintah tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan guna menyelesaikan masalah (Suharto, 2011, h. 3; Nugroho, 2012, h. 11). Eny Haryati (2003, h. 606, 607) menyimpulkan semakin demokratis sistem pemerintahan, maka kebijakan yang diambil semakin pro-rakyat. Di era demokrasi, kebijakan cenderung berwajah positif dan rasional. Pada sistem politik, di mana sistem suksesi ditentukan berdasarkan suara terbanyak, kebijakan yang diambil secara umum tidak akan melawan arus

logika masyarakat. Bahkan, pemimpin punya kecenderungan untuk memproteksi citra agar baik di mata masyarakat.

Pemerintahan Presiden Jokowi lahir dari proses pemilihan langsung pada tahun 2014. Ketika berkompetisi dalam Pilpres, Jokowi -berpasangan dengan Jusuf Kalla (JK)- dicitrakan sebagai sosok “*wong cilik*” yang sederhana, dekat dengan masyarakat, mau mendengar melalui *blusukan*, dan bekerja dengan ikhlas untuk rakyat. Hal itu dikuatkan dengan *framing* iklan politik “*Jokowi adalah*

Kita” (Nashirussolah, Diahloka & Widodo, 2014, h. 34) dan *Nawacita* sebagai agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK. Citra tersebut menjadi label yang hidup dalam pengetahuan masyarakat waktu itu, dan hasilnya memenangkan Jokowi.

Visi kepemimpinan seharusnya diterjemahkan dan konsisten dengan praktik kebijakan yang pro “*wong cilik*”. Namun, pemberitaan media cetak, *online*, dan pesan yang *viral* di media sosial pada bulan Desember 2016 hingga Januari 2017 mengindikasikan kebijakan Presiden Jokowi terkesan bertentangan dengan visinya. Bahkan, muncul pemberitaan berjudul “*Semua tarif naik, masih layakkah Jokowi disebut pemimpin wong cilik? Rakyat Dipaksa Untuk Tutupi Kebutuhan Sehari-Hari*” (Semua Tarif, 2017). Tulisan ini bertujuan memeriksa distorsi pemberitaan, apakah kebijakan Presiden Jokowi telah meninggalkan visi awalnya, ataukah hanya ketidاكلancaran komunikasi pembangunan dari pemerintah.

Komunikasi pembangunan adalah segala cara dan teknik penyampaian pesan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan kepada masyarakat yang menjadi sasaran, agar masyarakat dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam pembangunan (Nasution, 2004, h. 106). Wilbur Schramm (1964, h. 5, 20, 37) menyatakan media masa dapat menciptakan iklim yang mendukung pembangunan. Namun, di era media sosial, di mana semua orang mudah memproduksi informasi untuk masyarakat, banyak informasi tidak tersampaikan secara baik.

Bahkan, terjadi penerimaan yang sebaliknya sehingga terjadi distorsi komunikasi yang mengganggu pembangunan.

Pada konteks distorsi komunikasi, kajian Jean Baudrillard mengatakan realitas telah mati, hanya ada simulasi dan citra (*simulacra*). Reproduksi realitas tidak pernah merepresentasikan realitas, namun bersifat simulasi, yaitu duplikasi yang mengandung distorsi, bahkan bertentangan secara diametral dengan kenyataan (Piliang, 2004, h. 53-55, 59). Roland Barthes, penulis esai “*The death of the subject*” mengatakan ketika sebuah teks lahir, maka pengarang sesungguhnya telah tiada. Dia digantikan pembaca yang bebas untuk memberi tafsir atas teks. Teks bukan miliknya lagi, dan para pembaca merupakan pribadi yang berhak menerjemahkan teks sesuai kepentingannya. Jika dikaitkan dengan kajian semiotika, maka petanda tidak lagi sama dengan tanda (da Silva, 2005, h. 122).

Di dalam konteks tulisan ini, wujud teks adalah kebijakan pembangunan yang dikeluarkan atau dilakukan pemerintah terkait situasi tertentu. Kebijakan pembangunan merupakan teks tertulis yang ditafsirkan dan disebarkan ke masyarakat lewat media cetak, *online*, ataupun media sosial dalam *gadget*. Tidak sekadar ditafsir, ada kemungkinan untuk sengaja dipotong, diubah, dan disembunyikan beberapa faktanya, sehingga teks tersebut mendukung kepentingannya. Menggunakan bahasa yang populer, fakta tersebut “digoreng” sesuai tujuan penyebarannya.

Di dalam proses menulis, muncul penafsiran yang menjadi *discourse*. Saat

tersebar di masyarakat, *discourse* yang berupa pengetahuan, terkadang tidak utuh bahkan ditambah sehingga menjadi berbeda dengan teks aslinya. Perbedaan ini bisa mengarah pada berita bohong atau disebut *hoax*. Di era ini, perkembangan internet dan *gadget* di Indonesia yang melahirkan banyaknya media *online* merupakan habitus berita bohong. Menurut Dewan Pers terdapat 43.300 media *online* yang beroperasi di Indonesia dan hanya 243 yang terverifikasi dan terdaftar di Dewan Pers (Kominfo, 2017). Belum lagi jumlah pengguna media sosial (internet) yang diperkirakan berjumlah 82 juta orang atau nomor enam di dunia (Kominfo, 2014).

Michel Foucault selalu menyanggah kata *knowledge* dengan *power*, bahkan dalam berbagai tulisannya, Foucault selalu menulis *knowledge/power* (Foucault, 1980, h. 145, 176). Siapa yang bisa memproduksi pengetahuan akan mendapatkan kuasa. Proses memproduksi pengetahuan ke masyarakat ini dilakukan dengan *discourse*. *Discourse* secara umum dimaknai sebagai *knowledge* yang disandingkan dengan kata kekuasaan. Hal ini terjadi karena pewacanaan akan membangun atau melemahkan *image*. Melalui *discourse*, *knowledge* yang disebarkan diidentikkan dengan realitas. Di dalam dunia komunikasi politik, citra lebih penting daripada realitas (Wetherell, Taylor & Yates, 2001, h. 72-78).

Di era ini, Michel Foucault menyebut sebagai era *postmodern*, di mana kekuasaan tidak hanya milik pemerintah. Semua orang punya kemampuan untuk memengaruhi lewat pengetahuan atau informasi. Semua orang bisa memproduksi pengetahuan dengan

cara mengurangi informasi, menambahkan, dan menyebarkannya kembali (*discourse*). Jika informasi tidak disampaikan secara utuh, akan ada orang yang memotong berita dan menyampaikan secara tidak lengkap bahkan cenderung dibelokkan. Inilah yang disebut *epistemic lack*, informasi yang sengaja disampaikan secara tidak lengkap sehingga menguntungkan pembuat tanda (Walby, 2009, h. 37, 38, 41). Beberapa orang melakukan *epistemic lack* berupa *hoax* untuk iseng, kepentingan ekonomi, dan agenda politik tertentu.

Hoax telah ada sejak lama. Di era Orde Lama, Presiden Soekarno dan media massa dibohongi oleh sosok Markonah dan Idrus yang mengaku sebagai raja dan ratu dari suku Anak Dalam. Di era Orde Baru, pemerintah dan masyarakat dibohongi oleh berita janin yang bisa mengaji, sementara di era Reformasi muncul *hoax* harta karun batu tulis (Santoso, 2017). Namun, *hoax* semakin merajalela pada tahun 2016 seiring berkembangnya internet dan *gadget*. *Hoax* di media sosial terkait berita ringan, mulai dari *tips* kesehatan, ular raksasa, penemuan benda di masa nabi, sampai bahaya kebiasaan tertentu. Lama-kelamaan muncul *hoax* yang menyangkut persoalan sosial dan politik.

Hoax menjadi masalah ketika informasi mengandung fitnah kepada kelompok tertentu dan menjadi *viral*. Informasi bisa masuk secara cepat, di mana dan kapan saja, lewat *gadget*. *Hoax* tidak mudah dicek kebenarannya (difalsifikasi) sehingga begitu saja ditangkap sebagai kebenaran yang mendapat respons emosional. Beberapa berita

hoax mengakibatkan keributan dan konflik di masyarakat. Oleh karena itu, maraknya berita bohong melalui media sosial membuat beberapa orang melabeli *gadget* sebagai “*dajal*”, sebuah kepercayaan pada makhluk akhir zaman yang bermata satu dan menyebar fitnah.

METODE

Penelitian ini menganalisis distorsi pemberitaan terkait kebijakan pembangunan pemerintah Presiden Jokowi. Sumber informasi pertama didapatkan dari percakapan grup *whatsapp* bernama *Wong Bantul* pada bulan Desember 2016 hingga Januari 2017. Peneliti merupakan anggota grup ini. Pesan-pesan yang muncul dari grup *whatsapp* ini relevan diteliti karena anggota grup bersifat plural, terdiri dari berbagai kelompok sosial di Bantul, seperti warga NU, Muhammadiyah, HTI, FPI, dan juga kelompok non-muslim, sehingga pesan yang masuk sangat beragam dan dapat menggambarkan berita yang muncul di media sosial. Pada bulan Desember 2016 hingga Januari 2017, banyak pesan yang muncul dalam grup berisi kritikan kebijakan pemerintah. Sebagian pesan yang dikirim merupakan pesan dari berita di media *online* yang dicurigai peneliti merupakan berita *hoax*. Pesan-pesan tersebut bersumber dari beberapa media *online*, antara lain *Merdeka.com*, *Jurnal3.net*, *Eveline.co.id*, *Wartakota.tribunnews.com*, *Bangka.tribunnews.com*, *Jawapos.com*, dan *Republika.co.id*.

Berdasarkan pemberitaan di media *online* tersebut peneliti melacak dan menelusuri kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah yang mendasari munculnya

berita tersebut. Distorsi terjadi ketika pemberitaan tidak sama dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, peneliti mencari pembandingan terkait pemberitaan kebijakan-kebijakan tersebut dari media pemerintah sendiri yang muncul di *website* kominfo dan kementerian terkait. Jika tidak ditemukan penjelasan di *website* kementerian maka peneliti melacak ke media cetak dan media *online* lain. Hal ini digunakan untuk menjelaskan konsep *epistemic lack*, yang mana pengguna media sosial tidak menyampaikan pemberitaan secara lengkap, padahal muncul sudut pandang lain dari pemberitaan terkait satu kebijakan. Media cetak dan media *online* lain sebagai pembandingan untuk melihat pemberitaan dari sudut pandang yang berbeda adalah Kompas versi cetak dan versi *online*-nya. Kompas dipilih dengan alasan karena media ini bersifat nasional, satu-satunya media di Indonesia yang menjangkau 33 propinsi dan mempunyai oplah rerata harian 500.000 eksemplar atau terbesar di Indonesia (Kompas, 2016, h. 5; Arumdadi, 2009, h. 40). Jika muncul pemberitaan yang menyalahi etika jurnalistik atau mengandung unsur *hoax* di harian ini maka kemungkinan besar akan mendapat respons dari pemerintah.

Membandingkan informasi dari sumber berita dan berita menjadi penting karena merujuk pada kajian semiotika pascastrukturalis, Umberto Eco mengartikan semiotika sebagai ilmu tentang dusta, yaitu ilmu untuk mengungkap kebenaran dengan cara mengungkap bagaimana tanda, simbol, teks digunakan

untuk berdusta (Piliang, 2003, h. 44, 45). Pada awalnya tanda dimaknai sebagai teks yang tersusun dari dua realita yang tidak terpisahkan, yaitu penanda dan petanda. Penanda adalah material tanda yang dapat diindera, sedangkan petanda adalah makna konsep dari sebuah tanda (Budiman, 2011, h. 30, 31). Namun dalam perkembangannya seringkali teks sebagai tanda memalsukan realitas, seseorang mengatakan sesuatu sebagai [‘A], untuk realitas yang sebenarnya [A] (Piliang, 2003, h. 46). Pada kajian ini berita terkait kebijakan pemerintah di media *online* diduga punya makna yang berbeda dengan maksud kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

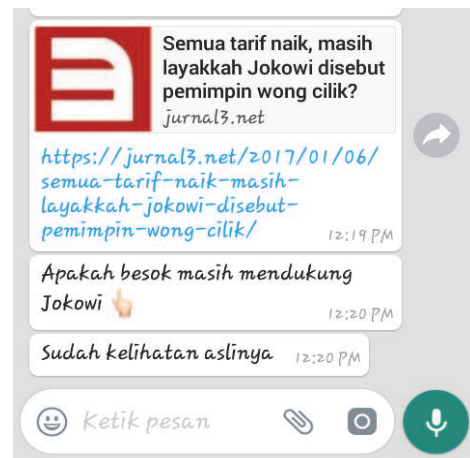
HASIL

Tema Diskusi Media Sosial Kurun Waktu Desember 2016-Januari 2017

Pemberitaan media terutama isu politik pada bulan Desember 2016 hingga Januari 2017 cukup panas dan “berisik”. Pada bulan Desember 2016, muncul aksi demonstrasi ‘*Bela Islam 212*’ terkait dugaan penistaan agama oleh Basuki Cahaya Purnama dan merembet ke pemberitaan makar. Selain itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan baru terkait kenaikan harga listrik, bahan bakar, dan biaya TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

Kebijakan-kebijakan tersebut banyak diperbincangkan di media sosial, salah satunya di grup *whatsapp* *Wong Bantul*. Agar tampak meyakinkan, komentar-komentar di media sosial banyak yang merujuk pada berita-berita di media *online*. Berita di media *online* ini dijadikan dasar

sehingga komentar di *whatsapp* tidak dianggap sekedar interpretasi subjektifnya, namun berdasar rujukan berita di internet.



Gambar 1 Media *Online* Dijadikan Rujukan Komentar di Grup *Whatsapp*

Bila diidentifikasi, berita *online* yang dijadikan referensi dan muncul di grup *whatsapp* *Wong Bantul* bulan Desember 2016 hingga Januari 2017 bersumber pada *Merdeka.com*, *Jurnal3.net*, *Eveline.co.id*, *Wartakota.tribunnews.com*, *Bangka.tribunnews.com*, *Jawapos.com*, dan *Republika.co.id*. Dilihat dari waktu pemberitaan, sebagian besar waktu pemberitaan di media *online* tersebut terjadi pada bulan Desember 2016 dan Januari 2017, namun ada juga pemberitaan lama yang dimunculkan kembali. Informasi yang disampaikan dalam media *online* rujukan tersebut sebagian besar berisi kritikan terhadap pemerintah, antara lain: 1) pemberitaan tentang masuknya tenaga kerja Tiongkok, 2) Pekerja Seks Komersial (PSK) dari Tiongkok, 3) narkoba dari Tiongkok, 4) uang baru bertanda PKI, 5) kenaikan biaya STNK, 6) kenaikan BBM, 7) kenaikan tarif dasar listrik, serta 8) impor sapi (Tabel 1).

Tabel 1 Pemberitaan Media Online yang Dirujuk Grup *Whatsapp Wong Bantul* Terkait Kritikan Terhadap Pemerintah Kurun Waktu Desember 2016-Januari 2016

No	Peristiwa	Deskripsi	Sumber Berita Online
1	Pekerja asing di Indonesia (Tiongkok)	Di media sosial timbul wacana bahwa pemerintahan Presiden Jokowi terlalu berkiblat kepada Tiongkok dan membiarkan tenaga kerja dari Tiongkok membanjiri Indonesia	https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-banjir-tenaga-kerja-china-haruskah-diwaspadai.html http://bangka.tribunnews.com/2016/05/02/menteri-rini-soemarno-bela-warga-china-yang-ngebor-di-bandara-halim http://wartakota.tribunnews.com/2016/04/28/5-warga-china-berpakaian-militer-ngebor-di-bandara-halim-ditangkap
2	Munculnya PSK dari luar negeri (Tiongkok)	Pemerintah membiarkan adanya PSK dari Tiongkok	http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/01/puluhan-psk-dari-cina-ditangkap-oleh-imigrasi-ini-videonya
3	Penyelundupan narkoba dari Tiongkok	Pemerintah membiarkan masuknya narkoba dari Tiongkok	http://eveline.co.id/fokus-persepsi/bnn-bongkar-penyelundupan-narkoba-dari-cina-netizen-meradang/
4	Uang baru	Pemerintah menghidupkan kembali ideologi komunis	http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/12/ogise5365-lambang-mirip-palu-arit-di-uang-pecahan-rp-100-ribu-heboh-di-medsos
5	Kenaikan biaya STNK	Pemerintah membebani masyarakat dengan kebijakan yang menindas	http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/04/biaya-stnk-naiknya-langsung-100-persen-sih http://www.jawapos.com/read/2017/01/05/100163/dua-kado-pahit-dari-pemerintah-di-awal-2017 http://jurnal3.net/2017/01/06/soal-kenaikan-stnk-bpkb-presiden-jokowi-berpura-pura/ https://www.merdeka.com/politik/pks-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-harga-bbm-tdl-surat-kendaraan.html
6	Kenaikan harga BBM	Pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat miskin	https://jurnal3.net/2017/01/06/semua-tarif-naik-masih-layakkah-jokowi-disebut-pemimpin-wong-cilik https://www.merdeka.com/politik/pks-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-harga-bbm-tdl-surat-kendaraan.html http://www.jawapos.com/read/2017/01/05/100163/dua-kado-pahit-dari-pemerintah-di-awal-2017
7	Kenaikan tarif dasar listrik	Pemerintah tidak berpihak kepada masyarakat miskin	https://jurnal3.net/2017/01/06/semua-tarif-naik-masih-layakkah-jokowi-disebut-pemimpin-wong-cilik https://www.merdeka.com/politik/pks-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-harga-bbm-tdl-surat-kendaraan.html http://www.jawapos.com/read/2017/01/05/100163/dua-kado-pahit-dari-pemerintah-di-awal-2017
8	Impor sapi	Pemerintah membuat kebijakan yang merugikan petani	https://www.merdeka.com/uang/peternak-sapi-meradang-jokowi-buka-keran-impor-sapi-dari-india.html

Sumber: Data primer

Ada delapan peristiwa dan delapan informasi negatif yang ditujukan kepada pemerintah di grup *whatsapp Wong Bantul* pada bulan Desember 2016 sampai Januari 2017. Informasi tersebut tidak muncul secara tiba-tiba berdasar komentar semata, namun merujuk pada sumber berita *online*.

Sebagian besar berita *online* yang menjadi rujukan pesan para pengomentor grup *whatsapp* tersebut merupakan berita baru. Namun demikian ada juga berita lama yang dimunculkan kembali oleh anggotanya, seperti berita *Republika.co.id* tentang lambang palu arit di uang baru yang telah

terbit pada tanggal 16 November 2016, namun dikirim ulang di grup *whatsapp* pada bulan Desember 2016.

Sebagian informasi negatif dari berita *online* tersebut telah dikonfirmasi oleh pemerintah, namun demikian tetap disebar pada bulan Desember 2016 dan setelahnya. Misalnya, berita terkait logo palu arit (PKI) di uang pecahan baru, pemerintah telah mengonfirmasi bahwa informasi tersebut tidak benar. Kejadiannya bermula pada tanggal 26 Oktober 2016 ketika Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 100.000 (Seratus Ribu) Tahun Emisi 2016. Namun, pemberitaan dalam media *online* bulan November dan dua bulan berikutnya masih memunculkan tuduhan bahwa dalam uang baru tersebut terdapat gambar palu arit yang merupakan logo PKI. *Republika online* pada tanggal 12 November 2016 masih menulis judul *Lambang Mirip Palu Arit di Uang Pecahan Rp 100 Ribu Heboh di Medsos* (Laeny, 2016). Padahal di halaman *Facebook* Bank Indonesia, dengan alamat <https://www.facebook.com/BankIndonesiaOfficial/posts/1087403111308589:0>, BI telah menjelaskan bahwa logo tersebut merupakan pengamanan uang (*rectoverso*) yang berupa bayang-bayang tulisan BI. Bayang-bayang tulisan BI jika diterawang jelas bertuliskan BI (Bank Indonesia) bukan logo PKI. Tulisan di *Republika.co.id* tersebut kemudian tersebar di grup *whatsapp* *Wong Bantul* pada bulan Desember 2016.

Terkait dengan tuduhan pembiaran peredaran narkoba dan PSK dari Tiongkok, aparat Indonesia telah melakukan penegakan hukum dengan menangkap para pelaku tindak kejahatan tersebut. Terkait dengan aspek hukum, tidak ada kebijakan baru yang diambil Pemerintah Jokowi sebelum dan selama peristiwa tersebut, apalagi aturan yang memberi ruang untuk munculnya peredaran narkoba dan PSK dari Tiongkok. Peraturan tentang narkoba masih menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang *Narkotika*. Terkait dengan asal negara PSK dan narkoba yang masuk ke Indonesia, tidak hanya berasal dari Tiongkok, namun dari Iran, Maroko, Tunisia, Vietnam, Thailand dan negara-negara yang jauh dari ideologi komunis pun juga pernah menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Namun demikian, dengan mengutip pemberitaan di media *Wartakota.tribunnews.com* dan *Eveline.co.id* tentang masuknya PSK dan narkoba dari Tiongkok ke Indonesia dalam jumlah banyak (Murtopo, 2017; Pratama, 2016a), muncul tuduhan di media sosial yang menghubungkan berita tersebut dengan pemerintah yang sengaja membiarkan hal itu terjadi karena pemerintah dianggap telah berkiblat ke Tiongkok.

Berdasar Tabel 1, pemberitaan pada bulan Desember 2016 hingga Januari 2017 didominasi dua wacana besar, yaitu pelemahan rasa nasionalisme pemerintahan Presiden Jokowi yang cenderung pro-Tiongkok (yang berideologi komunisme), dan pelemahan keberpihakan pemerintah Presiden Jokowi terhadap rakyat kecil ("*wong cilik*"). Pengelompokan ini terlihat di Tabel 2.

Tabel 2 Wacana Pemberitaan Media Sosial Kurun Waktu Desember 2016-Januari 2017

No	Wacana	Berita Pendukung
1	Pelemahan rasa nasionalisme pemerintahan Presiden Jokowi yang cenderung pro-Tiongkok yang berideologi komunisme	Palu Arit di Uang Indonesia Kiriman PSK Tiongkok Penyelundupan Narkoba dari Tiongkok Membanjirnya Pekerja Tiongkok (bisa masuk wacana 1 dan 2)
2	Pelemahan keberpihakan pemerintahan Presiden Jokowi pada “wong cilik”	Membanjirnya Pekerja Tiongkok (bisa masuk wacana 1 dan 2) Kenaikan Biaya STNK Impor Sapi Kenaikan Tarif Dasar Listrik Kenaikan Harga BBM

Sumber: Data primer

Pemberitaan Terkait Kebijakan Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan sosial yang terencana dan terprogram untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Midgley, 1995, h. 50). Sementara itu, kebijakan adalah instrumen pemerintah tentang apa yang dipilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan guna menyelesaikan masalah terkait satu situasi tertentu (Suharto, 2011, h. 3; Nugroho, 2012, h. 11). Peningkatan taraf hidup masyarakat menyangkut aspek pemenuhan layanan publik, kebutuhan dasar, dan juga akses dalam pekerjaan.

Berdasarkan definisi pembangunan dan berita di Tabel 2 maka berita yang mempunyai kaitan dengan kebijakan pembangunan adalah berita yang tergolong dalam wacana pelemahan keberpihakan pemerintah kepada “wong cilik”. Penelitian ini selanjutnya fokus menelusuri distorsi pada lima pemberitaan tersebut.

Ketersediaan lapangan pekerjaan merupakan satu aspek pembangunan yang banyak diwacanakan. Pada komentar-komentar di media sosial, muncul wacana bahwa pemerintahan Presiden Jokowi terlalu berkiblat kepada Tiongkok, bahkan

membiarkan masuknya pekerja dari Tiongkok yang mengancam pekerja Indonesia. Kekhawatiran serbuan tenaga kerja Tiongkok dipicu kemenangan Tiongkok dalam *tender* kereta super cepat Jakarta-Bandung tahun 2015 (Cina sapu bersih proyek infrastruktur, 2015). Wacana tersebut mendapat pengungkit pada bulan April 2016 terkait pemberitaan ditangkapnya warga Tiongkok berpakaian militer yang mengebor tanpa izin di Bandara Halim Perdana Kusuma (Jhs, 2016). Berita tersebut berasal dari media *online Wartakota.tribunnews.com* dengan judul *5 Warga China Berpakaian Militer Ngebor di Bandara Halim Ditangkap* yang kemudian tersebar di media sosial grup *whatsapp Wong Bantul*. Setelah itu dibenarkan juga dengan munculnya komentar yang merujuk pada berita di *Merdeka.com* dan *Bangka.tribunnews.com* (Lubabah, 2016; Menteri Rini, 2016).

Berita tentang serbuan tenaga kerja dari Tiongkok semakin ramai di media sosial pada bulan November 2016, yang sempat memunculkan pesan berantai berupa pengakuan masyarakat yang melihat pekerja Tiongkok dengan perawakan mirip militer masuk ke Indonesia. Informasi tersebut

ditanggapi oleh *Kompas.com* dengan menurunkan berita berjudul *Polisi: Isu Tentara Asal China yang Datang ke Bandara Soekarno-Hatta itu "hoax"* (Pratama, 2016b). Gambar 2 memperlihatkan berita yang menyebar di media sosial.

Meskipun berita kedatangan tentara Tiongkok merupakan berita *hoax*, namun informasinya menjadi *viral* di media sosial termasuk di grup *whatsapp Wong Bantul*. Berita tersebut cukup meyakinkan karena memuat data detail tentang nomor penerbangan, tempat menginap, ciri-ciri fisik, sampai plat nomor bus pengangkut. Wacana tentang infiltrasi Tiongkok ke Indonesia diperkuat dengan berita sebelumnya, yaitu pengibaran bendera Tiongkok sejajar dengan bendera Indonesia di Maluku Selatan dan Bali. Berita itu pun ditambah dengan pendapat yang "seolah-olah" berasal dari Prof. Yusril Ihza Mahendra. Meskipun berita tersebut tidak terkonfirmasi kebenarannya, namun *viral* di media sosial. Berita itu berjudul *10 Juta Pekerja China & Ancaman Kedaulatan Negara by @Yusrilihza_Mhd* yang disebar melalui Portal Piyungan ([http://](http://portalpiyungann.blogspot.co.id)

portalpiyungann.blogspot.co.id) dan media sosial dengan *hashtag #TolakImigranCina*.

Pemerintah tidak tinggal diam dengan pemberitaan serbuan tenaga kerja dari Tiongkok. Pemerintah menyampaikan data jumlah tenaga kerja ilegal Tiongkok di Indonesia hanya 800 Orang. Selain itu, pemerintah membangun argumen bahwa warga Tiongkok tidak mungkin bekerja sebagai buruh kasar di Indonesia, karena upah di negaranya jauh lebih besar daripada Indonesia (Fauzi, 2016). Namun, berita-berita tersebut kalah masuk akal dengan pemberitaan tentang imigran Tiongkok yang disertai dengan foto dan tayangan video. Akibatnya, pesan komunikasi pemerintah tidak cukup kuat ditangkap masyarakat dalam kasus ini. Bahkan tanggapan Menteri Perdagangan Rini Sumarno, yang mengatakan pengeboran di bandara oleh pekerja PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terjadi karena ketidaktahuan tim dimuat di *Bangka.tribunnews.com* dengan judul *Menteri Rini Soemarno Bela Warga China yang Ngebor di Bandara Halim* (Menteri Rini, 2016).

Hari jumat tgl 28 oktober 2016 Pkl 20.15 WIB bertempat di kedatangan Terminal.2. D Gate.3 Bandara Internasional Soekarno Hatta telah landing pesawat Cathay Pasifik no penerbangan CX 719 dari Hongkong membawa sebanyak 500 orang dari Cina hal hal yang dapat di laporkan sebagai berikut:

1).Pada pukul 20.15 WiB pesawat Cathay Pasifik CX 719 landing di Gate 3 Terminal.2D Bandara Internasional Soekarno Hatta.

2).Pada pukul 21.30 WIB rombongan meninggalkan Bandara menggunakan Bus Lion Airlines dengan plat form nomor B 7026 PJA menuju hotel POP ..dan rencan besok pagi akan ditempatkan di jakarta di perusahaan perusahaan milik China.

3). Penampilan para WNA china tersebut mayoritas bertubuh tegap dan berambut cepak dan didapatkan info mereka pura jadi pekerja bekerja untuk proyek pembangunan pembangkit listrik

Gambar 2 Berita Hoax Kedatangan Tentara Tiongkok ke Indonesia

Kemunculan berita secara bertubi-tubi dan tidak mendapat respons secara proporsional oleh pemerintah dibanding berita negatifnya menimbulkan asumsi petanda bahwa peristiwa tersebut benar dan dibiarkan terjadi. Di satu laman *Eveline.co.id* muncul komentar *Jangan-jangan negara ini dijual sama Rezim Jokowi? 95% udah dijual. Tinggal 5 persen yg belum* (Noviadi, 2016). Padahal, terkait dengan banyaknya tenaga asing dari Tiongkok, pemerintah tidak mengeluarkan aturan (kebijakan) khusus yang melunakkan mereka untuk menjadi tenaga asing di Indonesia. Pedomannya adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Wacana kedua terkait pembangunan yang muncul pada bulan Desember 2016 hingga Januari 2017 adalah berita tentang kebijakan pemerintah terkait layanan publik yang dianggap jauh dari menyejahterakan rakyat. Kasus kenaikan TNKB, harga bahan bakar, dan tarif dasar listrik menjadi wacana di awal tahun 2017. Beberapa media *online* yang dikutip di media sosial bahkan mengambil judul "*Kado Pahit*" *Awal 2017* (Al-Islam, 2017). Sebelumnya, judul yang sama muncul di *Jawapos.com* (Dna, 2017).

Berita kenaikan tarif listrik dan TNKB menghiasi pemberitaan surat kabar dan media elektronik di awal tahun. Pemberitaan tersebut dirujuk, diberi tambahan komentar, dan disebar ke media sosial. Pemberitaan "ingin mempertegas" tesis bahwa terjadi pelemahan keberpihakan

pemerintahan Presiden Jokowi pada rakyat atau "*wong cilik*".

Munculnya berita kenaikan biaya listrik didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 28 Tahun 2016 yang ditindaklanjuti dengan siaran pers PLN. Judul berita siaran pers mengindikasikan hal yang bertentangan dengan informasi yang beredar di media sosial dan pemberitaan di media *online* yang dirujuknya, yaitu *Tarif Listrik Januari 2017 Turun* (PLN, 2017). Berita itu menjelaskan ada 12 golongan tarif yang turun, dan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2017. Namun, PLN melakukan penambahan satu golongan tarif baru, yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM).

Sebelum 1 Januari 2017, PLN memasukkan semua rumah tangga yang menggunakan daya 900 VA ke dalam golongan yang mendapat subsidi dari negara. Namun PLN menemukan data bahwa di antara pengguna golongan 900 VA terdapat banyak rumah tangga yang termasuk golongan mampu sehingga kelompok tersebut harus dipisahkan dari rumah tangga miskin agar subsidi pemerintah diberikan secara lebih tepat. Jadi, petanda di media sosial yang menyatakan bahwa tarif 900VA sepenuhnya naik tidaklah benar, namun kenaikan hanya terjadi pada rumah tangga yang tidak masuk kategori miskin.

Terkait kenaikan harga BBM tanggal 5 Januari 2017, pemerintah hanya menaikkan harga bahan bakar khusus, yaitu pertamax, pertamax plus, pertamax turbo, pertamina dex, dexlite, dan pertalite, sedangkan harga

premium tidak mengalami kenaikan. Awal tahun 2017, lewat spanduk-spanduknya, Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta menyoroti kebijakan kenaikan harga minyak yang dinilai semakin menyengsarakan masyarakat. Pada pemberitaan *Merdeka.com* juga muncul informasi terjadi kenaikan harga bbm, tanpa menginformasikan bahwa harga premium tidak naik (Lubabah, 2017).

Terkait kenaikan biaya STNK, dasar beritanya (tanda) adalah Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia tertanggal 6 Januari 2017. Di dalam PP diinformasikan tidak semua biaya pengurusan STNK, BPKB, TNKB naik 100-300 persen, namun hanya beberapa biaya khusus. Hanya saja, pemberitaan yang muncul seolah-olah semua biaya naik. Hal ini tampak dari pemberitaan di *Wartakota.tribunnews.com* yang menulis *Wow, Biaya Penerbitan BPKB Naik 275 Persen, Pengesahan STNK Bayar Tiap Tahun*, dan berita di *Wartakota.tribunnews.com* dan *Jurnal3.net* yang menulis judul *Biaya STNK Kok Naiknya Langsung 100 Persen Sih* (Wow, 2017; M8, 2017; Salsa, 2017). Berita-berita tersebut juga disebarkan di grup *whatsapp Wong Bantul*.

Terkait berita impor sapi, pemerintah melakukannya berdasar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 RI No. 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal

Pemasukan. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi penyembelihan sapi betina produktif. Hal ini karena ketika harga daging sapi tinggi dan harga sapi betina lebih murah daripada harga sapi jantan, maka keberadaan sapi betina terancam disembelih. Padahal, ketika sapi betina disembelih, kedaulatan daging tidak akan pernah tercapai. Sejak tahun 2009 penyembelih sapi betina produktif termasuk sebagai tindakan pidana karena melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terutama pasal 18 ayat 4 dan pasal 86 yang mengancam pelaku dengan pidana kurungan dan denda. Jika impor daging dilakukan, maka tidak akan ada sapi betina yang disembelih. Impor daging tidak sekadar untuk memenuhi kebutuhan daging saat ini dan sekarang, namun untuk masa depan (Jordan, 2016). Kebijakan pemerintah tersebut tidak terkomunikasikan ke masyarakat, akibatnya informasi di media sosial dan berita di media *online* lebih banyak berupa tuduhan bahwa kebijakan impor sapi akan menyengsarakan petani.

PEMBAHASAN

Era digital ditandai dengan kemampuan orang menyebar informasi secara bebas. Semua orang dapat memproduksi pengetahuan melalui komentar di media sosial dan menyebarkannya ke masyarakat. Asalkan informasi logis, maka informasi dapat tersebar. Gerakan sosial baru memanfaatkan media sosial untuk membangun simpati dan mengumpulkan

massa pendukung berdasarkan logika, sehingga muncul adu argumen lewat *discourse* (Galuh, 2016, h. 87). Pemerintah tidak lagi berkuasa mutlak atas informasi yang beredar di masyarakat.

Salah satu cara agar komentar di media sosial lebih mudah diterima adalah menggunakan sumber rujukan ketika mengomentari satu peristiwa. Rujukan yang sering digunakan adalah berita *online*. Namun demikian penggunaan rujukan dari media *online* ketika berkomentar sering menimbulkan distorsi komunikasi karena isi berita di media *online* yang dijadikan rujukan sering kali berupa opini penulisnya, yang berbeda dengan sumber primer. Hal ini misalnya terjadi ketika mengomentari kenaikan listrik di awal Januari 2017, ketika komentar di media sosial merujuk pada media *online* maka hampir semua berita *online* menulis tentang kenaikan tarif listrik. Padahal jika komentar merujuk pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mendapatkan informasi bahwa 12 golongan tarif PLN turun dan hanya ada satu golongan tarif baru (naik), yaitu rumah tangga mampu dengan daya 900 VA (R-1/900 VA-RTM).

Berita tentang kebijakan pemerintah ini tidak ada yang menyebar secara baik, sehingga terjadi distorsi pemberitaan antara berita yang muncul dengan logika sumber berita. Sebagian informasi di media sosial dan berita di media *online* merupakan data yang diinterpretasi (opini) pembuatnya, tanpa menghadirkan maksud dari pemerintah. Bahkan, sebagian wacana berposisi dengan gagasan sumber berita

yang akhirnya menjadi *hoax*. Fenomena ini menunjukkan matinya realitas, dalam bahasa Roland Barthes, pembaca telah membunuh penulis yang membuat teks (da Silva, 2005, h. 122). Hal ini juga sejalan dengan konsep Umberto Eco bahwa tanda (berita) digunakan dan diproduksi sebagai alat untuk berdusta (Piliang, 2003, h. 44, 45). Agar kedustaan dari tanda itu terungkap perlu adanya wacana balik.

Tulisan Sandy Allifiansyah (2016, h. 157) memperlihatkan ketika pemerintah Jokowi menaikkan harga BBM pada bulan November 2014, relatif tidak banyak gejolak, berbeda dengan tahun 2017. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya wacana dukungan kebijakan pemerintah yang menandingi kritik terhadap kebijakan Jokowi dalam bentuk *meme* di media sosial pada tahun 2014. Ketika ada interpretasi kritis terkait kenaikan harga BBM, selalu muncul informasi tandingan. Namun, jika tidak ada wacana balik dari pemerintah, maka pemerintah akan kelihatan salah secara mutlak. Meskipun demikian, wacana balik yang jauh dari rasional hanya melahirkan antipati.

Banyak berita *hoax* diterima dan tersebar ke masyarakat sehingga menjadi *viral*. Salah satu faktornya adalah berita *hoax* tidak seratus persen bohong. Sebagian informasi dari berita *hoax* merupakan informasi yang *valid*, namun terjadi pengurangan, penambahan, dan penafsiran informasi yang menyebabkan terjadinya distorsi antara penanda dan petanda. Hal ini misalnya tampak dari berita soal tenaga kerja ilegal ataupun narkoba

dari Tiongkok ke Indonesia. Peristiwa tersebut benar terjadi di Indonesia, namun tidak berarti pemerintah telah terbeli dan membiarkannya. Interpretasi bahwa pemerintah telah terbeli merupakan opini yang berbeda dari realitas dan kebijakan pemerintah.

Berita *hoax* semakin mendapatkan validasi karena disertai bukti berupa foto dan video. Gambar-gambar yang menyertainya seolah-olah memvalidkan tafsiran yang sedang dibangun. Gambar-gambar tersebut melemahkan penjelasan pemerintah yang hanya berupa argumen tanpa didukung gambar dan data yang memadai. Hal ini misalnya, nampak dari kasus tenaga kerja dari Tiongkok dan tuduhan palu arit di mata uang baru. Meskipun palu arit sesungguhnya *recto verso* dalam bentuk tulisan BI, namun ketika lambang tersebut sepintas nampak seperti gambar palu arit, maka pengetahuan masyarakat akan terbawa pada imajinasi tersebut dan berita cenderung disebar.

Namun, berita *hoax* yang tidak didukung data yang meyakinkan tidak akan bertahan lama. Berita tersebut akan hilang secara alami ketika bertemu dengan kondisi yang sesungguhnya, semisal kenaikan harga TNKB. Ketika sudah terlihat bohong dan tidak masuk akal, maka orang relatif tidak menyebarkannya.

Maraknya berita *hoax* di media sosial di Indonesia juga disebabkan faktor sejarah kemunculan internet. Masyarakat percaya pada informasi dari internet, terutama melalui penggunaan mesin pencarian *Google*. Kemampuan *Google* untuk

memberikan pengetahuan bersifat cepat dan tidak tertandingi, sehingga muncul istilah "*Mbah Google*". *Google* seakan-akan menjadi "profesor" atau paranormal yang mengetahui apa pun. Orang yang bisa mengakses *Google* seakan-akan menguasai dunia. Sekolah pun ramai memerintahkan muridnya untuk tidak hanya belajar dari buku pelajaran, namun harus membuka wawasan lewat *Google*. Situasi ini makin berkembang ketika gawai berbasis sistem *Android* masuk Indonesia. Untuk bertanya kepada *Google*, tidak lagi harus melalui komputer meja, namun dapat dilakukan lewat *mobile phone* yang dapat dibawa ke mana-mana. Perkembangan teknologi internet memungkinkan semakin banyak orang memproduksi wacana lewat *website* sendiri dan muncul *software* media sosial yang memudahkan tersebarnya informasi. Akibatnya, setiap orang mempunyai akses dan kekuasaan untuk memproduksi wacana dan menyebarkannya lewat jejaring sosial. Informasi apa pun dari internet, bahkan dari *Facebook* ataupun *blogspot*, dianggap sebagai sumber berita yang selalu valid sehingga layak disebar. Hal ini ditambah dengan melemahnya kredibilitas media elektronik dan cetak karena dianggap berafiliasi dengan kepentingan partai politik.

Media *online* yang dikutip dan menjadi rujukan media sosial (*Whatsapp* grup *Wong Bantul*) cenderung berorientasi pada banyaknya laman mereka dibaca orang. Prinsip yang dibangun adalah semakin banyak laman media *online* dibuka (diklik), maka keuntungan finansial akan semakin mengalir dari iklan. Prinsip ini memengaruhi

sudut pandang dalam menyampaikan berita dari media *online*, sehingga beritanya cenderung memberikan informasi bombastis yang berbeda dari berita di media cetak. Hal ini tampak dari pemilihan judul dan isi berita di media sosial yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang muncul di media *online* banyak yang hanya dari satu sisi, tidak menggunakan asas penyiaran *cover both sides*, sehingga cenderung bersifat interpretasi dari komentar satu sumber informan dan terkadang *hoax*. Jika mereka membuat berita dari dua sisi seringkali berita tersebut dibuat dalam judul dan laman yang terpisah sehingga muncul dua judul berita yang bertentangan dari satu kantor berita *online*. Pengguna media sosial terkadang hanya membaca dan mendasarkan komentarnya pada satu tulisan yang sesuai dengan persepsinya dan mengabaikan tulisan yang lain. Beberapa berita di media sosial juga memilih judul yang bombastis, namun isinya sekadar pertanyaan, komentar, atau dugaan dari informan. Runyamnya, informasi tersebut banyak dikutip dan disebar di media sosial.

SIMPULAN

Ketika muncul dua perspektif berita dari satu peristiwa berarti terjadi distorsi komunikasi dengan sumber primernya. Hal itu karena sebagian berita media *online* yang dirujuk media sosial merupakan berita opini, yaitu interpretasi penulis atas satu realitas. Tulisan-tulisan yang muncul bukan berita dari perspektif pemerintah.

Munculnya distorsi dalam komunikasi pembangunan pemerintah Jokowi terjadi

karena pemberitaan versi pemerintah tidak banyak beredar di media *online* dan sosial. Pemberitaan di media konvensional pun minim, bahkan sering tidak ada. Mesin pencarian *Google* memperlihatkan fakta tersebut. Bila mencari informasi berita pemerintah di *website* Kominfo atau kementerian terkait, tidak ada penjelasan tentang tuduhan kepada pemerintah di media sosial. Tidak ada komunikasi yang baik dari pemerintah untuk menanggapi tuduhan yang muncul. Teori Roland Barthes yang mengatakan bahwa penulis telah mati dan tinggal pembaca yang bisa menafsirkan apa saja, terjadi dalam peristiwa tersebut. Pembaca bisa melakukan tafsiran karena kebijakan yang dibuat pembuat tanda memungkinkan muncul banyak perspektif.

Saran

Tulisan ini menyarankan agar pembuat tanda (pemerintah) berusaha seminimal mungkin menyuguhkan informasi multitafsir. Bila muncul tafsiran yang berbeda, hendaknya perspektif tersebut diantisipasi, sehingga interpretasi terhadap data tidak meluncur liar di masyarakat apalagi menjadi *viral*. Selain itu, perlu lembaga khusus yang memberikan informasi terkait semua kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah, termasuk cara mengatasi bila ada interpretasi yang berbeda dari masyarakat. Pemerintah tidak boleh menyerahkan sepenuhnya komunikasi pembangunan pemerintah ke masyarakat kepada media konvensional karena hampir semua media mempunyai ideologi dan kepentingan atas berita (Syas, 2015, h. 133-134).

Komunikasi pembangunan yang baik dari pemerintah ke masyarakat dapat meningkatkan hadirnya negara di masyarakat. Semua kebijakan pemerintah harus terkomunikasikan secara lengkap kepada masyarakat. Namun, lembaga tersebut tidak perlu menjadi penghukum, bahkan tidak perlu menjadi *panopticon*. Mengikuti Michel Foucault, *panopticon* adalah sebuah lembaga yang selalu mengintai dan memata-matai masyarakat (Foucault, 1980, h. 157). Lembaga tersebut cukup menjadi lembaga diseminasi gagasan dan praktik pembangunan yang dimiliki pemerintah. Ketika masyarakat mengalami kebingungan terhadap satu berita, maka lembaga ini menjadi rujukan utama untuk menyediakan informasinya. Lembaga tersebut berdiri di satu kementerian, seperti Kominfo, bukan berada langsung di bawah presiden atau di banyak kementerian. Semakin terpusat pemberitaan versi pemerintah, semakin mudah masyarakat untuk menguji validitas berita yang berseliweran di media sosial. Lembaga tersebut juga tidak dianjurkan berada di bawah presiden. Semakin dekat dengan presiden, maka kesalahan semakin mudah dilimpahkan ke presiden.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Islam. (2017, 13 Januari). "Kado pahit" awal tahun 2017. *Yukberhijrah.wordpress.com*. <<https://yukberhijrah.wordpress.com/2017/01/26/kado-pahit-awal-2017/>>
- Allifiansyah, S. (2016). Kaum muda, meme, dan demokrasi digital di Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 151-164.
- Arumdati, P. (2009). *Analisis kebijakan pengenalan PPH pasal 23 atas jasa pemasangan iklan di media cetak melalui withholding tax system*. Skripsi. Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia.
- Bank Indonesia (2016, 11 November). *Mengenal Tanda-Tanda di Uang Rupiah: Gambar Saling Isi (Rectoverso)* <<https://www.facebook.com/BankIndonesiaOfficial/posts/1087403111308589:0>>.
- Budiman, K. (2011). *Semiotika visual: Konsep, isu, dan problem ikonitas*. Yogyakarta, Indonesia: Jalasutra.
- Cina sapu bersih proyek infrastruktur. (2015, 24 April). *Kontan*, h. 1.
- da Silva. G. C. (2005). Strukturalisme dan analisis semiotik atas kebudayaan. Dalam Mudji Sutrisno dan Hendar Putranto, *Teori-teori kebudayaan* (h.113-124). Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
- Dna. (2017, 5 Januari). Duakado pahit dari pemerintah di awal 2017. *Jawapos.com* <<http://www.jawapos.com/read/2017/01/05/100163/dua-kado-pahit-dari-pemerintah-di-awal-2017>>
- Fauzi, A. (2016, 23 Desember). Luhut sebut tenaga kerja ilegal asal China di Indonesia hanya 800 orang. *Kompas.com*. <<http://regional.kompas.com/read/2016/12/23/195800626/luhut.sebut.tenaga.kerja.ilegal.asal.china.di.indonesia.hanya.800.orang>>
- Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected interviews and other writings, 1972-1977*. London, UK: The Harvester Press.
- Galuh, I. G. A. A. K. (2016). Media sosial sebagai strategi gerakan Bali tolak reklamasi. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 73-92.
- Haryati, E. (2003). *Pembangunan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan: Kajian diakronis pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter kebijakan pembangunan masyarakat desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia*. Disertasi. Sekolah Pascasarjana UGM, Yogyakarta, Indonesia.
- Jhs. (2016, 28 April). 5 warga China berpakaian militer ngebor di Bandara Halim ditangkap. *Wartakota.tribunnews.com*. <<http://wartakota.tribunnews.com/2016/04/28/5-warga-china-berpakaian-militer-ngebor-di-bandara-halim-ditangkap>>

- Jordan, R. (2016, 21 Juni). RI impor daging, Jokowi: Kalau tidak impor, sapi betina disembelih. *Finance.detik.com*. <<https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3238365/ri-impordaging-jokowi-kalau-tidak-imporsapi-betina-disembelih>>
- Kominfo. (2014, 8 Mei). Kemkominfo: Pengguna internet di Indonesia capai 82 juta. *Kominfo.go.id*. <https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3980/Kemkominfo%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+Capai+82+Juta/0/berita_satker>
- Kominfo. (2017, 9 Januari). R code jadi solusi singkirkan portal berita penebar hoax. *Kominfo.go.id*. <https://kominfo.go.id/content/detail/8733/qr-code-jadi-solusi-singkirkan-portal-berita-penebar-hoax/0/sorotan_media>
- Kompas. (2016). *Kompas Media Kit 2016*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
- Laeny, RR. (2016, 12 November). Lambang mirip palu arit di uang pecahan Rp 100 ribu heboh di medsos. *Republika.co.id*. <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/11/12/ogise5365-lambang-mirip-palu-arit-di-uang-pecahan-rp-100-ribu-heboh-di-medsos>>
- Lubabah, R. G. (2016, 18 Juli). Indonesia banjir tenaga kerja China, haruskah diwaspadai?. *Merdeka.com*. <<https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-banjir-tenaga-kerja-china-haruskah-diwaspadai.html>>
- (2017, 6 Januari). PKS desak Jokowi batalkan kenaikan harga BBM, TDL & surat kendaraan. *Merdeka.com*. <<https://www.merdeka.com/politik/pks-desak-jokowi-batalkan-kenaikan-harga-bbm-tdl-surat-kendaraan.html>>
- M8. (2017, 4 Januari). Biaya STNK kok naiknya langsung 100 persen sih. *Wartakota.tribunnews.com* <<http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/04/biaya-stnk-kok-naiknya-langsung-100-persen-sih>>
- Menteri Rini. (2016, 2 Mei). Menteri Rini Soemarno bela warga China yang ngebor di Bandara Halim. *Bangka.tribunnews.com*. <<http://bangka.tribunnews.com/2016/05/02/menteri-rini-soemarno-bela-warga-china-yang-ngebor-di-bandara-halim>>
- Midgley, J. (1995). *Social development: The developmental perspective in social welfare*. London, UK: Sage Publications Ltd.
- Murtopo. (2017, 1 Januari). Puluhan PSK dari Cina ditangkap oleh imigrasi, ini videonya. *Wartakota.tribunnews.com*. <<http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/01/puluhan-psk-dari-cina-ditangkap-oleh-imigrasi-ini-videonya>>
- Nashirusolah, Diahloka, C. & Widodo, H. P. (2014). Analisis semiotik pencitraan Jokowi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 34-40.
- Nasution, Z. (2004). *Komunikasi pembangunan: Pengenalan teori dan penerapannya*. Jakarta, Indonesia: PT Raja Grafindo Persada.
- Noviadi. (2016, 18 Desember). Ada lagi, bendera China dikibarkan di Pantai Bali, netizen: Bakar itu benderanya. *Eveline.co.id*. <<http://eveline.co.id/nasional/ada-lagi-bendera-china-dikibarkan-di-pantai-bali-netizen-bakar-itu-benderanya>>
- Nugroho, R. (2012). *Social policy for developing countries*. Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/29/PBI/2016 tentang pengeluaran uang rupiah kertas pecahan 100.000 (seratus ribu) tahun emisi 2016. (2016). <http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Documents/PBI_182916.pdf>
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). (2016). <<http://jdih.esdm.go.id/peraturan/Permen%20ESDM%20No.%2028%20Th%202016.pdf>>
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing. (2015). <http://tka-online.naker.go.id/pdf/PERMEN_16_TAHUN_2015.pdf>

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tentang pemasukan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan. (2016). <https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=405203&task=detail&catid=3&Itemid=42&tahun=2016>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2016). <https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_perundangan&id=405383&task=detail&catid=3&Itemid=42&tahun=2016>
- Piliang, Y. A. (2003). *Hipersemiotika: tafsir cultural studies atas matinya makna*. Yogyakarta: Jalasutra.
- , (2004). *Posrealitas: Realitas kebudayaan dalam era posmetafisika*. Yogyakarta, Indonesia: Jalasutra.
- PLN. (2017, 1 Januari). Tarif listrik Januari 2017 turun. *Pln.co.id*. <<http://www.pln.co.id/2017/01/01/tarif-listrik-januari-2017-turun>>.
- Pratama, A. M. (2016a, 18 Juli). BNN bongkar penyelundupan narkoba dari Cina, netizen meradang. *Eveline.co.id*. <<http://eveline.co.id/fokus-persepsi/bnn-bongkar-penyelundupan-narkoba-dari-cina-netizen-meradang/>>
- , (2016b, 31 Oktober). Polisi: Isu tentara asal China yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta itu "hoax". *Kompas.com*. <<http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/31/18545531/polisi.isu.tentara.asal.china.yang.datang.ke.bandara.soekarno-hatta.itu.hoax>>
- Salsa. (2017, 6 Januari). Soal kenaikan STNK & BPKB, Presiden Jokowi berpura-pura. *Jurnal3.net*. <<https://jurnal3.net/2017/01/06/soal-kenaikan-stnk-bpkb-presiden-jokowi-berpura-pura/>>
- Santoso, I. (2017, 26 Februari). Hoaks, dari era Soekarno hingga kini. *Kompas*, h. 2.
- Schramm, W. (1964). *Mass media and national development: The role of information in the developing countries*. California, US: Stanford University Press.
- Semua tarif. (2017, 6 Januari). Semua tarif naik, masih layakkah Jokowi disebut pemimpin wong cilik?: Rakyat dipaksa untuk tutupi kebutuhan sehari-hari. *Jurnal3.net*. <<https://jurnal3.net/2017/01/06/semua-tarif-naik-masih-layakkah-jokowi-disebut-pemimpin-wong-cilik/>>
- Suharto, E. (2011). *Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung, Indonesia: Penerbit Alfabeta.
- Syas, M. (2015). Konstruksi realitas pemberitaan tentang konflik Indonesia - Malaysia di surat kabar Media Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(2), 124-134.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tentang peternakan dan kesehatan hewan. (2009). <<http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2009/06/04/undang-undang-no-18-tahun-2009>>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang narkotika. (2009). Jakarta, Indonesia: Cipta Karya.
- Walby, S. (2009). Beyond the politics of location: The power of argument in gender equality politics. Dalam Emanuela Lombardo, Petra Meier, dan Mieke Verloo, (eds.), *The discursive politics of gender equality: stretching, bending and policymaking* (h. 36-51). London, UK: Routledge.
- Wetherell, M., Taylor, S. & Yates, SJ. (2001). *Discourse theory and practice*. London, UK: Sage Publications.
- Wow. (2017, 2 Januari). Wow, biaya penerbitan BPKB naik 275 persen, pengesahan STNK bayar tiap tahun. *Wartakota.tribunnews.com*. <<http://wartakota.tribunnews.com/2017/01/02/wow-biaya-penerbitan-bpkb-naik-275-persen-pengesahan-stnk-bayar-tiap-tahun>>

